

JUDUL PROYEK : SELAMATKAN SAMPIRI

LAPORAN AKHIR (JANUARI – JUNI 2017)

(PERIODE : 5 BULAN)



Disusun oleh:



Office & Demosite : Br. Medahan, Desa Kemenuh, Sukawati,
Gianyar, 80582, Bali – Indonesia
Telp/Fax +62-361 294 993) www.idepfoundation.org

SELAMATKAN SAMPIRI

LAPORAN AKHIR (JANUARI – JUNI 2017)

Daftar isi	ii
I. INFORMASI PROYEK	1
II. RINGKASAN	2
III. OUTPUT	4
IV. PEMBELAJARAN	9
V. ASUMSI DAN RISIKO	11
VI. STATUS KEUANGAN	13
VII. LAMPIRAN.....	14

I. Informasi Proyek

<u>Wilayah Pendanaan</u>	:	Sangihe Talaud dan Koridor Laut Sulawesi Utara
KBA	:	Karakelang Utara, Karakelang Selatan (IDN 020)
Strategic Direction(s)	:	1. Perlindungan jenis Nuri Talaud 2. Perlindungan tapak;
<u>Nama Proyek</u>	:	SELAMATKAN SAMPIRI
<u>Nomor Laporan</u>	:	01
<u>Periode waktu</u>	:	Januari 2017 – Juni 2017 (5 bulan)
<u>Disampaikan oleh</u>	:	YAYASAN IDEP SELARAS ALAM
<u>Tanggal</u>	:	14 Juni 2017

Hibah CEPF:

(a) dalam USD	:	
(b) dalam mata uang lokal (Rp)	:	
Kontribusi Mitra	:	

<u>Kontribusi donor (proyek) lain</u>	:	Tidak ada
<u>Periode proyek</u>	:	Januari 2017 – Juni 2017
Lembaga pelaksana (mitra)	:	Yayasan IDEP Selaras Alam

II. RINGKASAN

Nuri Talaud atau Sampiri oleh IUCN diklasifikasikan sebagai jenis terancam punah secara global akibat penangkapan untuk diperdagangkan. Dari tiga anak jenis Nuri Talaud, jenis *Eos histrio talautensis* yang masih bertahan hidup dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Karakelang, pulau terbesar dari gugusan Kepulauan Talaud. Survei monitoring tahun 2006 populasinya sebanyak 12.664 individu dengan kisaran 6.567 hingga 25.066 individu (Burung Indonesia, 2006). Adanya program dari Burung Indonesia di Talaud hingga tahun 2007, menurunkan aktifitas penangkapan oleh masyarakat dan permintaan pasar berkurang.

Tiga tahun belakangan ini (pasca 2013) penangkapan dan perdagangan sampiri mulai marak karena permintaan pasar yang tinggi. Dibeberapa desa banyak sampiri yang di pelihara di rumah penduduk. Selain dijual ke nelayan Filipina, burung ini kerap dijadikan souvenir oleh mahasiswa, oknum TNI/Polri, dan masyarakat jika bepergian ke Manado.

Kurangnya kesadaran masyarakat, desakan ekonomi, belum adanya regulasi perlindungan di daerah, dan lemahnya pengawasan oleh KSDA, menyebabkan penangkapan dan perdagangan sampiri tetap berlangsung sampai saat ini.

Tujuan Proyek

Proyek ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan Membangun kesadaran, komitmen dan kapasitas masyarakat, Pemerintah Daerah serta Para Pihak strategis lainnya dalam melestarikan KBA yang mendukung penyelamatan Sampiri (*Eos histrio talautensis*) di Kepulauan Talaud.

Pencapaian Penting berdasarkan Keluaran dan Kegiatan

Capaian-capaian penting yang berhasil diwujudkan berdasarkan output dan aktivitas yang dilakukan antara lain :

1. Disepakatinya Sampiri dijadikan Maskot Daerah dan akan dicanangkan pada HUT ke-15 Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 02 Juli 2017. Capaian ini tidak sesuai dengan harapan diawal program dimana pada akhir program akan diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Sampiri dijadikan Maskot Daerah. Hal ini tidak bisa dicapai dikarenakan susahya bertemu dengan Bupati. Disaat pelaksanaan program Bupati sering mengadakan kunjungan ke luar daerah, dan pada tiga kesempatan pertemuan tidak berhasil mendapatkan waktu yang cukup untuk berdiskusi. Strategi akhirnya dirubah dengan mengadakan pertemuan lewat Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang memfasilitasi pertemuan dengan Sekretaris Daerah. Pada akhirnya kesepakatan dicapai dengan pendelegasian kepada Yayasan IDEP untuk menyusun narasi Pencanangan Sampiri sebagai Maskot Daerah dengan seremoni pelepasan burung sampiri pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2017 di Pulau Sara.
2. Terbentuknya Kelompok Pecinta Alam Desa (KPAD) di tiga desa sasaran program yaitu KPAD D2 desa Dapihe dan Dapalan, KPAD Salarigan desa Tuabatu Kecamatan

Tanpan'amma, dan KPAD Mandiaga desa Rae Selatan Kecamatan Beo Utara. Pembentukan KPAD ini disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa masing-masing desa. Di tiga desa ini juga telah dibuat Peta Zonasi Permakultur/Zonasi KBA.

3. Pada pertemuan kedua di Diskusi Lintas SKPD yang melibatkan DPRD, Yayasan IDEP dipercayakan oleh DPRD untuk menilai dan merevisi Perda tentang Sampiri sebagai Satwa Khas Daerah sebelum diadakan uji publik.

III. OUTPUT

Output 2. TERBANGUN KERJASAMA DENGAN PEMDA DAN PARA PIHAK UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN SATWA DAN KBA YANG EFEKTIF

Kegiatan 1. Rapat Koordinasi dengan para pihak dalam mengembangkan dan menerapkan pendekatan pengelolaan KBA yang mendukung kelestarian Sampiri (*Eos histrio talautensis*) dalam program pembangunan di lintas sektor.

Serangkaian konsultasi telah dilakukan dengan sejumlah stakeholder penting di tingkatan Pemerintah Daerah dan Propinsi. Konsultasi dengan SKPD terkait rutin dilakukan untuk memaparkan maksud program dan hal-hal yang menjadi tujuan akhir dari program. Diawal program, konsultasi dengan Kepala Bapelitbang (Bappeda) menunjukkan sikap yang peduli dengan pelaksanaan program yang dilakukan Yayasan IDEP. SKPD terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup (sebelumnya Badan Pengelolaan LH), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Humas), juga menyatakan mendukung program tetapi pada batasan wacana. Ditingkatan Pemerintah Propinsi seperti KSDA (Resort Suaka Margasatwa Karakelang Utara dan Selatan) turut terlibat dalam beberapa kegiatan yang dilakukan IDEP. Disaat pelaksanaan program Dinas Kehutanan kabupaten dilebur dalam pengelolaan Dinas Kehutanan Propinsi, sehingga di daerah menjadi Resort Pengelolaan Hutan Lindung (RPHL) Wilayah Sangihe, Sitaro dan Talaud. Pada beberapa konsultasi RPHL Talaud masih dalam pembenahan baik struktur kepengurusan maupun program kerja belum ada. Staf yang ada di kantor Resort masih bingung dengan tupoksi barunya, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap program.

Seiring dengan pelaksanaan proyek, Kepala Bapelitbang menunjukkan bantuan yang sangat besar bagi tim, di mana konsultasi dilakukan secara rutin dan tim difasilitasi dalam hal mengundang SKPD terkait pelaksanaan Diskusi Lintas SKPD. Diskusi ini dilaksanakan di aula Bapelitbang dan dihadiri oleh beberapa SKPD yang diundang walaupun yang hadir dalam pertemuan tersebut sebatas Kepala Bagian/Seksi (lihat Lampiran Daftar Hadir dan Berita Acara). Dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya serius dengan aksi-aksi konservasi terutama pelestarian burung sampiri, dan kedepan diharapkan kerjasama antara IDEP dengan Pemda Talaud dapat bersinergi sehingga upaya penyelamatan sampiri bisa maksimal dan Sampiri bisa menjadi Maskot Daerah yang diatur lewat Peraturan Daerah.

Pada pertemuan kedua untuk pelaksanaan Diskusi Lintas SKPD strategi awal dirubah dimana pendekatan difokuskan di kantor Sekretariat Daerah dengan Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Sekretaris Daerah (Sekda). Juga diadakan pendekatan dengan beberapa anggota DPRD. Pertemuan kedua Diskusi Lintas SKPD diadakan dalam bentuk Rapat (Makan Malam), dan menghasilkan beberapa keluaran antara lain kesepakatan untuk



Gambar 1 : Pertemuan/Diskusi Lintas SKPD pertama dan kedua yang dilakukan di Aula Bapelitbang (kiri) dan RM. Panorama Melonguane (kanan).

mendelegasikan Yayasan IDEP menyusun narasi Pencanangan Sampiri sebagai Maskot Daerah dengan seremoni pelepasan burung sampiri pada acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2017 di pulau Sara. Juga dipercayakan oleh DPRD untuk menilai dan merevisi Perda tentang Sampiri sebagai Satwa Khas Daerah sebelum diadakan uji public (Lampiran Daftar Hadir dan Berita Acara).

Kegiatan 2. Mendorong keputusan Bupati untuk menetapkan Sampiri (*Eos histrio talautensis*) sebagai Maskot kabupaten Talaud.

Beberapa kali berkonsultasi dengan Bupati tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini tidak bisa dicapai dikarenakan susahnya bertemu dengan Bupati. Disaat pelaksanaan program Bupati sering mengadakan kunjungan ke luar daerah, dan pada tiga kesempatan pertemuan tidak berhasil mendapatkan waktu yang cukup untuk berdiskusi. Strategi akhirnya dirubah dengan mengadakan pertemuan lewat Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang memfasilitasi pertemuan dengan Sekretaris Daerah. Pada akhirnya kesepakatan dicapai dengan pendelegasian kepada Yayasan IDEP untuk menyusun narasi Pencanangan Sampiri sebagai Maskot Daerah dengan seremoni pelepasan burung sampiri pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2017 di pulau Sara. Diharapkan dimasa depan (program lanjutan) Sampiri sebagai Maskot Daerah bisa didorong untuk di Perdakan.



Gambar 2 :

Pertemuan dengan Sekda, Ass. II, dan beberapa SKPD di kantor Sekretariat Daerah membahas mengenai Sampiri sebagai Maskot Daerah yang akan dicanangkan pada Upacara HUT Daerah di pulau Sara.

Output 3. TERSEPAKATINYA MODEL PARTISIPATIF SKEMA TATA RUANG KELOLA MASYARAKAT DI 3 DESA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Diskusi kampung dalam menyusun dan menyepakati ruang kelola dan model kelembagaan masyarakat dalam melestarikan KBA yang mendukung kelestarian Sampiri (*Eos histrio talautensis*).

Diawal pertemuan dengan pemerintah desa dan masyarakat di tiga desa sasaran, setelah menyampaikan program Selamatkan Sampiri diadakan diskusi mengenai ruang kelola dan kelembagaan yang ada didesa. Hasil dari diskusi kampung ini akhirnya disepakati untuk membuat peta zonasi desa yang memperlihatkan wilayah desa dan peruntukannya, dan rencana dibentuknya satu lembaga desa dalam bentuk Kelompok Pecinta Alam Desa (KPAD). Kelompok ini diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam pelestarian alam desa secara umum dan khususnya melestarikan KBA yang mendukung kelestarian Sampiri (lihat Lampiran Berita Acara, Daftar Isi, dan Peta Zonasi Desa).



Gambar 3 : Pembuatan Peta zonasi desa oleh masyarakat desa Tuabatu (gambar kiri) dan desa Dapihe-Dapalan (gambar kanan).

Kegiatan 2. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan rekomendasi penyusunan model kelembagaan dalam mewujudkan inisiatif local dalam melestarikan KBA yang mendukung kelestarian Sampiri (*Eos histrio talautensis*).

Lewat beberapa kegiatan pertemuan, konsultasi dengan Kepala Desa dan diskusi kampung yang dilakukan di tiga desa sasaran, akhirnya disepakati dan dibentuk Kelompok Pecinta Alam Desa (KPAD). Untuk desa Tuabatu, kelompok beranggotakan masyarakat dari kaum muda, kaum perempuan dan aparat desa, dan dinamakan “Salaringan” (artinya peramah) yang merupakan nama bukit berhutan dibelakang desa yang dikelola oleh adat.

KPAD desa Dapihe dinamakan “D2” (artinya Dapihe- Dapalan) karena anggotanya gabungan antara anak-anak muda dari desa Dapihe dan desa Dapalan. Dan desa Rae Selatan menamakan dirinya KPAD “Mandiaga” yang artinya menjaga. Ketiga KPAD ini disahkan melalui SK Kepala Desa masing-masing desa (Lihat Lampiran SK Kepala Desa).



Gambar 4 : KPAD yang dibentuk ditiga desa sasaran program, Desa Tuabatu (kiri), Desa Dapihe-Dapalan (tengah), dan Desa Rae Selatan (kanan).

Kegiatan 3. Meningkatkan kapasitas lembaga local yang terbentuk dalam melakukan aksi-aksi konservasi berdasarkan skala prioritas di masing masing desa.

Penguatan kapasitas lembaga dalam hal ini KPAD di tiga desa, baru sebatas pembuatan peta Zonasi, dan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Untuk desa Dapihe dan Rae Selatan diberikan pelatihan mengenai Tata cara penanaman Tanaman Penghijauan, sehubungan kegiatan penanaman di dua desa tersebut. Untuk desa Rae Selatan berhubungan dengan program IDEP-CEPF dimana kelompok ini diberi tanggung jawab untuk melaksanakan penghijauan di zona 5 di wilayah zonasi desa mereka. Untuk KPAD D2 desa Dapihe-Dapalan berhubungan dengan program KPAD D2 yang sudah ditunjang pendanaannya lewat ADD kedua desa tersebut.



Gambar 5 : Penanaman tanaman penghijauan di desa Rae Selatan (kiri), dan Pembibitan tanaman konservasi yang disiapkan oleh KPAD D2 desa Dapihe-Dapalan (kanan).

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen Verifikasi
Sampiri/Nuri Talaud – <i>Eos histrio talautensis</i>	Perburuan dan perdagangan	Perburuan dan perdagangan sampiri terutama di 3 desa sasaran program Selamatkan Sampiri, yaitu Rae Selatan, Tuabatu dan Dapihe/Dapalan, dan desa Bengel yang menjadi sasaran program IDEP-CEPF diakhir program tidak ada kasus lagi.	Data hasil Patroli KSDA Talaud bulan Juni 2017

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas KBA yang mendapatkan peningkatan pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Karakelang Utara	APL menjadi HL	290 ha	- SK Menhut No. SK.434/Menhut-II/2013 - Peta lembar 2520

3. Perlindungan kawasan

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan / tahun penetapan	Dokumen Verifikasi
Taman Buru Karakelang	Menunjuk kawasan sebagai Taman Buru	± 21.800 hektar / 1979	SK Menteri Pertanian No. 510/Kpts/UB/8/1979 tanggal 8 Agustus 1979
Taman Buru Karakelang	Menetapkan kawasan sebagai Taman Buru	± 24.669 hektar / Tahun 1979	SK Menteri Kehutanan No. 760/Kpts-II/1997 tanggal 12 Desember 1979
Suaka Margasatwa	Menetapkan,	± 24.669 hektar /	SK Menteri

Karakelang	mengubah fungsi dan menunjuk kawasan sebagai Suaka Margasatwa	Tahun 2000	Kehutanan No.97/Kpts-II/2000 tanggal 22 Desember 2000
Hutan Lindung Karakelang	Hutan Lindung	9000 ha	SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 452/Kpts-II/99 tanggal 17 Juni 1999

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat

Nama Komunitas	Jenis Komunitas							Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Komunitas perkotaan	Lainnya	50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
Kelompok Pecinta Alam Desa (KPAD)			✓					✓			

b. Jumlah Penerima manfaat langsung

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih	-	-
Meningkatnya ketersediaan pangan	-	-
Meningkatnya akses ke sumber energi (Listrik)	-	-
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, Pendidikan dll)	-	-

Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim	-	-
Kepemilikan lahan yang jelas	-	-
Pengakuan terhadap kearifan lokal	-	-
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan	-	-
Peningkatan akses atas jasa lingkungan	-	-
Pelatihan Konservasi Dasar	73	30
Total Penerima Manfaat	103 orang	

5. Regulasi / Kebijakan Lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup	Topik	Hasil yang diharapkan
Draft Peraturan Daerah	Lokal / Kabupaten	Sampiri sebagai Satwa Khas Daerah	Perda ditetapkan
Pencanangan Maskot Daerah	Kabupaten	Sampiri Maskot/Ikon Talaud	Dicanangkan pada Hut ke-15 Kab. Talaud Tahun 2017

6. Jaringan Kerja /Forum Multipihak

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan
<ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah Daerah: <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah (Sekda, Assisten II, Bagian Hukum) - Bapelitbang - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Dinas Perhubungan - Dinas Lingkungan Hidup ● Pemerintah Provinsi : <ul style="list-style-type: none"> - BKSDA - Dinas Kehutanan (RPHL Talaud) ● DPRD Talaud ● RRI Talaud ● KPAD di 3 desa 	Lokal / Kabupaten	PERDA , Kelompok Kerja Selamatkan Sampiri	Belum ditetapkan

7. Bentang alam produktif

Nama bentang alam produktif	Bentuk peningkatan pengelolaan bentang	Luas bentang alam produktif yang	Dokumen verifikasi
-----------------------------	--	----------------------------------	--------------------

	alam produktif	mendapatkan peningkatan pengelolaan	
Suaka Margasatwa Karakelang	Pengawasan dan patroli oleh BKSDA	± 24.669 ha	SK Menteri Kehutanan No.97/Kpts-II/2000 tanggal 22 Desember 2000
Hutan Lindung	Pengawasan dan Patroli oleh Dinas Kehutanan	± 9000 ha	- SK Menhut No. SK.434/Menhut-II/2013 - Peta lembar 2520

V. PEMBELAJARAN, ASUMSI DAN RISIKO

PEMBELAJARAN

Output 2. TERBANGUN KERJASAMA DENGAN PEMDA DAN PARA PIHAK UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN SATWA DAN KBA YANG EFEKTIF

Untuk kegiatan yang dilakukan di Output 2 pada dasarnya berjalan dengan baik terutama pada kegiatan konsultasi dengan pimpinan daerah dan pimpinan SKPD yang terkait. Strategi yang dipakai yaitu dengan berkonsultasi langsung di tiap kantor SKPD bisa dilaksanakan dengan baik walaupun hasil maksimal yang diharapkan di akhir program kurang berhasil.

Hasil yang dicapai kurang maksimal dikarenakan kondisi politik yang terjadi dipemerintahan daerah yang kurang kondusif. Hal ini berhubungan dengan semakin dekatnya Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilangsungkan pada tahun 2018, dimana beberapa bakal calon Bupati mulai mengadakan kegiatan konsolidasi di Talaud. Sikap paranoid diperlihatkan oleh Bupati yang akan mencalonkan diri kembali, dimana bawahannya yang terdeteksi berhubungan dengan bakal calon lainnya langsung dimutasikan.

Hal ini mendapatkan pelajaran bahwa dimasa depan strategi ini bisa diterapkan kembali tetapi pada situasi pemerintahan yang kondisi politiknya kondusif, dimana pejabat yang didekati/teman program bisa terlibat dari awal hingga akhir program.

Output 3. TERSEPAKATINYA MODEL PARTISIPATIF SKEMA TATA RUANG KELOLA MASYARAKAT DI 3 DESA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada output 3 ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan beberapa penyesuaian strategi dilapangan. Seperti di desa Rae Selatan, Kepala Desa sangat prosedural dimana setiap kegiatan yang akan dilakukan didesa harus diketahui oleh Camat, dan harus dihadiri Kepala Desa dengan tata cara ala pemerintah. Pada awalnya hal ini menjadi halangan untuk mengadakan pertemuan, tetapi seiring waktu berjalan hal tersebut bisa dilalui dengan baik.

Diawal program untuk mengumpulkan masyarakat dalam satu pertemuan desa sedikit sulit dikarenakan masyarakat sudah dibiasakan dengan program-program sebelumnya seperti program PNPM dimana pada setiap pertemuan masyarakat diberi “uang duduk” (uang pengganti hari ekonomi).

Hal lain yang dihadapi program ini adalah saat pertemuan didesa jika ada kegiatan kemasyarakatan seperti pesta perkawinan, acara adat atau kedukaan (orang meninggal) maka masyarakat akan mengutamakan kegiatan tersebut. Hal ini beberapa kali terjadi, walaupun jadwal kegiatan sudah disepakati bersama tetapi langsung dibatalkan jika ada

kegiatan masyarakat di atas. Hal ini juga terjadi karena sistem komunikasi yang ada (jaringan telepon) di tiga desa sasaran program sangat buruk.

Dengan kendala-kendala yang ada seperti di atas, maka dimasa depan diperlukan penyesuaian dalam hal perencanaan pendanaan program.

ASUMSI DAN RISIKO

Output 2. TERBANGUN KERJASAMA DENGAN PEMDA DAN PARA PIHAK UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN SATWA DAN KBA YANG EFEKTIF

Kegiatan 1. Rapat Koordinasi dengan para pihak dalam mengembangkan dan menerapkan pendekatan pengelolaan KBA yang mendukung kelestarian Sampiri (*Eos histrio talautensis*) dalam program pembangunan di lintas sektor.

Pada tingkat koordinasi dengan Pemerintahan Daerah khususnya dengan pimpinan SKPD (Kepala Badan/Kepala Dinas) sesuai dengan asumsi awal dimana semuanya mendukung program dan menyatakan setuju agar ada regulasi daerah yang akan mengatur mengenai pelestarian sampiri dan menjadikan sampiri sebagai Maskot Daerah. Tetapi pada keputusan selanjutnya semuanya dikembalikan kepada Bupati sebagai pimpinan daerah.

Beberapa kendala yang ditemui selama program berjalan, dimana terjadinya perubahan/penggantian pimpinan SKPD, dan beberapa pimpinan belum definitif atau berstatus PLT (Pelaksana Tugas). Hal ini mempengaruhi tindakan/keputusan dimana kelihatan beberapa pimpinan ragu-ragu atau takut mengambil keputusan dan cenderung mencari jalan aman.

Kegiatan 2. Mendorong keputusan Bupati untuk menetapkan Sampiri (*Eos histrio talautensis*) sebagai Maskot kabupaten Talaud.

Pada tingkatan ini terjadi perubahan politik ditingkat pemerintah daerah sehubungan dengan persiapan Pilkada tahun 2018. Pimpinan SKPD terkesan takut dan mencari jalan aman karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi mutasi atau penggantian pimpinan. Bupati jarang berada ditempat karena mengadakan kunjungan keluar daerah dan jika kembali ke daerah, lebih banyak melakukan kunjungan kerja di desa yang terkesan berbau kampanye politik.

Respon lembaga dalam menyikapi hal ini adalah dengan mengadakan konsultasi yang lebih serius dengan pembantu Bupati, dalam hal ini Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sekretaris Daerah serta DPRD untuk mendorong setidaknya Sampiri bisa diangkat/dicanangkan menjadi Maskot Daerah. Walaupun indikator SK Bupati tidak bisa dicapai tetapi Sampiri sebagai Maskot Daerah untuk dicanangkan pada HUT Daerah pada akhirnya diterima oleh Bupati.

Output 3. TERSEPAKATINYA MODEL PARTISIPATIF SKEMA TATA RUANG KELOLA MASYARAKAT DI 3 DESA DENGAN SISTEM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN

Pada intinya pemerintah desa dan masyarakat mendukung program dan apa yang menjadi tujuan akhir program dapat dicapai. Beberapa kendala yang dihadapi tim dilapangan dapat dilalui dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

VI. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan :
- b. Pengeluaran :
- c. Saldo :